

**SISTEM AKUNTANSI PENERIMAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH
PAJAK KENDERAAN DAN BEA BALIK NAMA PADA UNIT
PELAKSANAAN TEKNIS KANTOR DISPENDA
TEBING TINGGI**

SKRIPSI

OLEH :

MARIANI LUBIS

NIM : 99.830.0326



**JURUBAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS MEDAN AREA
M E D A N
2 0 0 4**

Judul Skripsi

**SISTEM AKUNTANSI PENERIMAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH
PAJAK KENDERAAN DAN BEA BALIK NAMA PADA UNIT
PELAKSANAAN TEKNIS KANTOR DISPENDA
TEBING TINGGI**

Nama Mahasiswa : MARIANTI LUBIS

NIM : 99.830.0325

Jurusan : Akuntansi



**Menyetujui :
Komisi Pembimbing**

Pembimbing I

(Drs. ZAINAL ABIDIN)

Pembimbing II

(Drs. ALI USMAN SIREGAR)

Mengetahui

Ketua Jurusan

(Dra. Hj. RETNAWATI SIREGAR)

Dekan



(Drs. H. SYAHRIANDY, MSI)

Tanggal Lulus: 30 Oktober 2004

RINGKASAN

MARIAN LUBIS, SISTEM AKUNTANSI PENERIMAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH PAJAK DAN BEA BALIK NAMA KENDERAAN BERMOTOR PADA UNIT PELAKSANAAN TEKNIS DAERAH TEBING TINGGI. Di bawah bimbingan Drs. ZAINAL ABIDIN, sebagai Pembimbing I, dan Drs. ALI USMAN SIREGAR, sebagai Pembimbing II.

Unit Pelaksana Teknis Daerah Tebing Tinggi adalah salah satu Unit Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Sumatera Utara yang mendukung operasional secara langsung atas pengelolaan (pengadministrasian, pengutipan dan penyetoran) Pendapatan Asli Daerah yang berasal dari Pajak dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (PKB/BBN-KB) dengan wilayah kerjanya Kota Tebing Tinggi dan sebagian dari Kabupaten Deli Serdang.

Sejalan dengan perkembangan sosial ekonomi, kebijakan Pemerintah serta aspirasi masyarakat wajib pajak terhadap adanya sistem perpajakan yang menekankan pada aspek transparansi, akuntabilitas, efisien dan efektif. Yang menjadi permasalahan sejauh mana Kantor Bersama Sistem Administrasi Manunggal Dibawah Satu Atap (SAMSAT) Unit Pelaksanaan Teknis Dinas Pendapatan Daerah Tebing Tinggi menerapkan sistem akuntansi keuangan daerah yang didefinisikan "sebagai suatu proses identifikasi, pengukuran, pencatatan dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) dari suatu daerah (propinsi, kabupaten, kota) pada umumnya dan khususnya dalam pengelolaan pajak kendaraan bermotor (PKB/BBN-KB).

Dapat dijelaskan bahwa kedua jenis pungutan ini adalah Pajak Daerah, yakni pajak yang kewenangan pemungutannya berada pada Pemerintah Propinsi dan dikelola oleh Dinas Pendapatan Daerah. Hasil penerimaannya masuk ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan pemungutannya diatur dengan Peraturan Daerah (Perda) yang berlaku sesudah mendapat pengesahan dari instansi atasan yang berwenang.

Sistem pemungutan kedua jenis pajak ini adalah sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada Pemerintah Daerah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak pemilik kendaraan bermotor (official assessment system).

Sebagaimana dimaklumi bahwa sebelum diberlakukannya Sistem Administrasi Manunggal Dibawah Satu Atap (SAMSAT), para masyarakat pemilik kendaraan bermotor didalam menyelesaikan kewajibannya yang berkaitan dengan kendaraan bermotor, yaitu :

1. Penyelesaian Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) khusus Propinsi Sumatera Utara terbagi dua yaitu : eks Keresidenan Sumatera Timur ditandai dengan BK sedangkan eks Keresidenan Tapanuli ditandai dengan BB.
2. Penyelesaian pembayaran PKB dan BBN-KB.
3. Penyelesaian SWDKLLJ (Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan).

Harus berhubungan secara terpisah dengan masing-masing instansi yang bersangkutan yaitu Polri, Dinas Pendapatan Daerah dan Perum Asuransi Kerugian Jasa Raharja, sehingga para pemilik kendaraan bermotor harus menyediakan cukup waktu untuk dapat memenuhi kewajibannya.

Mengingat hal tersebut di atas dipandang perlu untuk melaksanakan suatu sistem yang dapat mendukung terwujudnya pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat dan pada gilirannya peningkatan pendapatan daerah khususnya pada sektor pajak kendaraan bennotor, pengawasan serta keamanan kendaraan bennotor, maka telah diwujudkan Sistem Administrasi Manunggal Dibawah Satu Atap (SAMSAT) dengan tujuan antara lain :

1. Menyederhanakan, mempercepat dan dapat dipertanggungjawabkan pelayanan dan penyelesaian pembayaran pajak-pajak kendaraan bermotor, STNK dan Dana Kecelakaan Jasa Raharja.
2. Efisiensi di dalam administrasi pemungutan.
3. Penyederhanaan cara pembayaran pungutan-pungutan dan pengawasan surat-surat yang ada kaitannya dengan kendaraan bermotor.

Berdasarkan tujuan tersebut di atas untuk melaksanakan Sistem Administrasi Manunggal Dibawah Satu Atap (SAMSAT) dalam proses penyelesaian pelunasan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB dan BBN-KB) terkait dengan penyelesaian Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) dibentuk Kantor Bersama Sistem Administrasi Manunggal Dibawah Satu Atap (SAMSAT) dengan

kerjasama antara Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara, Komando Daerah Kepolisian (POLDA Sumut) dan P.T. Asuransi Kecelakaan Jasa Raharja

Untuk mendukung mekanisme kerja pada Kantor Bersama SAMSAT dibentuk Kelompok Kerja (POKJA) yang melaksanakan rangkaian proses kegiatan dan prosedur pelayanan dan pada dasarnya dapat digolongkan dalam 3 (tiga) pentahapan yaitu :

- a. Proses awal (informasi, pengisian formulir).
- b. Proses pendaftaran (penelitian persyaratan dokumen).
- c. Proses penyelesaian (penyerahan Surat Tanda Nomor Kenderaan dan lampirannya).

Apabila ditelusuri rangkaian kegiatan mekanisme kerja Sistem Administrasi Manunggal Dibawah Satu Atap tersebut adalah merupakan sistem ban berjalan, yaitu setiap berkas prosesnya harus melalui tingkatan-tingkatan yang ditentukan (tidak dapat dilakukan tanpa melewati salah satu tingkat dengan melompat ke tingkat lain).

Dengan demikian menurut hasil penelitian penulis proses kegiatan dan prosedur dalam menyelenggarakan berbagai kegiatan untuk penyelesaian pembayaran Pajak, Bea Balik Nama Kenderaan Bermotor yang dikaitkan dengan pengeluaran Surat Tanda Nomor Kenderaan Bermotor pada Kantor Bersama SAMSAT Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Tinggi, sistem akuntansi telah diterapkan mengingat rangkaian kegiatan, prosedur yang saling berkaitan dan tata cara pencatatan data akuntansi, penetapan, pembukuan, pengutipan serta penyetoran uang penerimaan berdasarkan wewenang dan ketentuan yang berlaku.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim.

Dengan mengucapkan puji dan rasa syukur kepada Allah SWT, shalawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini untuk melengkapi syarat dalam memperoleh gelar Sarjana I pada Fakultas Ekonomi Universitas Medan Area.

Dalam penulisan skripsi ini penulis banyak menghadapi kesulitan karena keterbatasan dan kemampuan, namun demikian penulis sangat bersyukur dan berterima kasih oleh karena telah banyak mendapatkan perhatian dan dukungan dari berbagai pihak yang turut membantu menyelesaikan skripsi ini.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Ayahanda Drs. Zainuddin Lubis dan Ibunda Siti Nauli Nasution beserta semua saudara-saudara saya yang telah mendoakan dan memberi semangat atas berhasilnya dalam menyelesaikan pendidikan saya ini.
2. Bapak H. Syahriandy, SE, MSi., selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Medan Area.
3. Ibu Dra. Hj. Retnawati Siregar, selaku Ketua Jurusan Akuntansi.
4. Bapak Drs. Zainal Abidin, selaku Dosen Pembimbing I yang telah banyak memberikan bimbingan, arahan dan perhatian serta ilmu pengetahuan yang sangat berharga bagi penulis dalam melengkapi penyusunan skripsi ini.

5. Bapak Drs. Ali Usman Siregar, selaku Dosen Pembimbing II dengan sabar memberikan bimbingan dan arahan sehingga selesainya penulisan skripsi ini.
6. Ibu Dra. Hj. Rafiah Hasibuan, sebagai Ketua yang telah banyak memberikan saran, masukan dan bimbingan dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Bapak Kepala Dinas Pendapatan Propinsi Sumatera Utara beserta staf telah memberikan izin untuk melaksanakan riset dan bahan-bahan keterangan yang sangat diperlukan dalam penyusunan skripsi ini.
8. Tak lupa penulis mengucapkan terima kasih kepada semua teman-teman di Jurusan Akuntansi dan semua pegawai Fakultas Ekonomi Universitas Medan Area yang selama ini memberikan pelayanan yang baik kepada penulis selama mengikuti kuliah.

Semoga Allah SWT memberikan rahmat dan ridho-Nya kepada kita semua dan skripsi ini memberikan sumbangan pemikiran kepada pembaca.

Medan, Oktober 2004

Wassalam,

MARIANI LUBIS

DAFTAR ISI

	Halaman
RINGKASAN	i
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR GAMBAR DAN TABEL	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Alasan Pemilihan Judul.....	1
B. Perumusan Masalah.....	3
C. Luas dan Tujuan Penelitian.....	4
D. Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data.....	5
E. Metode Analisis.....	6
BAB II LANDASAN TEORITIS	7
A. Pengertian Sistem Akuntansi.....	7
B. Pengertian Pajak Dan Jenis-jenis Pajak.....	16
C. Sistem Pemungutan Pajak dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.....	26
D. Pengawasan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.....	33

BAB III	UNIT PELAKSANAAN TEKNIS DINAS PENDAPATAN	
	DAERAH TEBING TINGGI (UPTD)	38
	A. Gambaran Umum	38
	B. Dasar Hukum Pendapatan Daerah	47
	C. Sistem Pemungutan Pajak dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	49
	D. Pengawasan Pajak dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	62
BAB IV	ANALISIS DAN EVALUASI	65
BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN	73
	A. Kesimpulan	73
	B. Saran	74
	DAFTAR PUSTAKA	76

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim, *Akuntansi Sektor Publik : Akuntansi Keuangan Daerah*, Edisi 1, Penerbit Salemba Empat, Jakarta, 2002.
- Brotodihardjo, R. Santoso, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, PT. Eresco, Bandung, 1991.
- D. Hartono, *Akuntansi Untuk Usahawan*, Edisi V, LPFE-UI, Jakarta, 1991.
- H.S. Hadibroto, *Masalah Akuntansi*, LPFE-Universitas Indonesia, Jakarta, 1992.
- H.S. Hadibroto, Sudrajat Sukadam, *Akuntansi Intermediate*, PT. Ichtiar Baru-Van Hoeve, Jakarta, 1982.
- Indra Bastian, *Standart Akuntansi Keuangan Pemerintahan*, Edisi Pertama, Cetakan Pertama, Penerbit Pusat Pengembangan Akuntansi FE-UGM.
- Indra Bastian, Gatot Soepriyanto, *Sistem Akuntansi Sektor Publik : Konsep Untuk Pemerintah Daerah*, Buku 1, Edisi 1, Penerbit Salemba Empat, Jakarta, 2003.
- James A. Hall, *Sistem Informasi Akuntansi*, Edisi Pertama, Penerbit Salemba Empat, Jakarta, 2001.
- Lalu Herdy Yulanya, *Akuntansi Pemerintahan*, Edisi Kedua, FE-UI, Jakarta.
- Mardiasmo, *Perpajakan*, Edisi III, Penerbit Andi Offset, Yogyakarta, 1996.
- Prabowo, Yusfianto, *Akuntansi Perpajakan Terapan*, PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2002.
- Pudyanmoko, Y. Sri, *Pengantar Hukum Pajak*, Penerbit Andi Offset, Yogyakarta, 2002.
- Surakhmad, Winarno, *Dasar dan Teknik Research Pengantar Metodologi Penelitian*, Bumi Aksara, Jakarta, 1992.
- Wafuyo, Wirawan B. Ilyas, *Akuntansi Perpajakan Indonesia*, Edisi Pertama, Jakarta, 2002.
- Zaki Baridwan, *Sistem Akuntansi. Penyusunan, Prosedur dan Metode*, Edisi V, Cetakan Pertama, BPFE, Yogyakarta, 1991.